

SEKILAS MEDIA

Sinar Indonesia Baru
Jumat, 12 November 2010

“Wagubsu Terima Kepala BPK Perwakilan Sumut : BPK Periksa Kepatuhan Pajak PT Bank Sumut Tahun 2008 dan 2009”

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan di PT Bank Sumut terkait kepatuhan pajak untuk tahun 2008 dan 2009. Pemeriksaan ini dilakukan selama enam minggu di beberapa cabang yang dianggap potensial dan produktif, yaitu Cabang Pematang Siantar dan Cabang Labuhan Batu. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberitahukan adanya pemeriksaan ini kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) sebagai pemegang saham terbesar di PT Bank Sumut.

Seputar Indonesia
Selasa, 16 November 2010

“Koruptor Dinas PU Binjai Segera Ditahan”

Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera menahan para tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan pembangunan (pengerasan) jalan pada kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Binjai tahun anggaran 2007 – 2008. Penahanan ini berdasarkan laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang menemukan adanya kerugian negara yang mencapai Rp 2,5 miliar dalam proses pengerjaan proyek ini.

Waspada
Kamis, 18 November 2010

“DPRD Minta BPK Audit Akper/Akbid Pemkab Langkat”

DPRD Kabupaten Langkat meminta BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan audit terhadap Akademi Keperawatan/ Akademi Kebidanan Pemkab Langkat. Akper/Akbid tersebut menggunakan aset pemerintah Kabupaten Langkat tetapi tidak memberikan pendapatan asli daerah ke kas Pemkab Langkat. Audit ini diharapkan dapat memperjelas legalitas hukum aset tersebut dan memberikan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Langkat.

Waspada
Kamis, 25 November 2010

“Presiden Kembali Disurati : Kejati Lengkapi Hasil Audit BPK – BPKP untuk Periksa RH”

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengirimkan surat permohonan izin pemeriksaan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, RH, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permohonan izin pemeriksaan ini juga dilengkapi dengan data kerugian negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemeriksa BPK dan BPKP



REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),

Barani M Silalahi (bs), Hj.Sri Madonna (sm), Hj.Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon),

Ermila Oecthari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhyan (ard), Arief R (arra),

Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan

Telp. 061-4519039 ext. 321



Tahun Ketiga
Edisi November 2010

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



DARI REDAKSI

MENCAPAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Opini ini diberikan kepada entitas yang mampu menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Wajar juga berarti bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap dalam penyajian informasi.

Di Provinsi Sumatera Utara, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini tidak ada satu pun entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini WTP. Pada pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2009, opini tertinggi yang dapat dicapai oleh entitas adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan ada pula yang mendapatkan opini disclaimer. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan tersendiri karena LKPD merupakan unsur terpenting dalam pengambilan keputusan. Apabila LKPD tersebut tidak mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk para pemegang kepentingan maka kredibilitas pemerintah daerah tersebut dalam hal pengelolaan tanggung jawab keuangan negara juga patut dipertanyakan.

Bagi pemerintah daerah, pencapaian WTP mempunyai arti tersendiri terkait adanya sistem *reward and punishment* yang diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk memotivasi pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD. Pemda yang berhasil mencapai WTP akan memperoleh *reward* berupa tambahan dana transfer. Sebaliknya, jika opini yang diperoleh jelek maka jatah dana transfer bagi Pemda tersebut akan dikurangi. Kebijakan ini bagaikan dua sisi mata uang yang harus disikapi dengan arif oleh pemerintah daerah. Pejabat pemda bisa saja menghalalkan segala cara untuk mencapai opini WTP termasuk dengan berusaha menyuap para pemeriksa BPK. Oleh karena itu tujuan sebenarnya bukanlah mencapai opini WTP tetapi mewujudkan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. (mt)

Daftar Isi...

Hal.1	- Dari Redaksi	
	- Indahnya Berkurban	Hal.5
Hal.2	- Sosialisasi Menuju Opini WTP	- Ujian Tertulis Penerimaan CPNS BPK RI 2010
Hal.3	- Diklat Sosialisasi PP no.54/2010	Hal.6
Hal.4	- Kenali Entitas: Kota Deli Serdang	- Museum Negeri Sumatera Utara
	- Upgrade Your Mind	Hal.7
		- Pojok Bahasa Anak Medan
		- Tentang BPK
		- Galeri Foto
		Hal. 8
		- Sekilas Media

INDAHNYA BERKURBAN

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1431 H, Sistem Tolong-Menolong (STM) Muslim BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 November 2010. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman aula Kompleks Perumahan BPK I, Jalan Gaperta, Medan.

Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, STM Muslim BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyembelihan satu ekor sapi dan empat ekor kam-



bing yang didapatkan dari beberapa muzaki (pemberi zakat) di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penyembelihan dimulai pukul 09.00 dihadiri oleh beberapa

pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan penyembelihan pegawai-pegawai secara bersama-sama memotong daging kurban dan membaginya dengan rata. Daging-daging tersebut akan dibagikan kepada sekitar 100orangmustahik(orangyangberhakmenerima zakat).

.....bersambung ke halaman 3

SOSIALISASI MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

Dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2010 dan menghadapi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan Sosialisasi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kamis dan Jumat, 11 – 12 November 2010. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan diikuti oleh sekretaris daerah, inspektur dan beberapa kepala dinas dari 33 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi empat sesi. Sesi pertama dan kedua dilaksanakan pada Kamis, 11 November 2010 dengan peserta dari kota/kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2009. Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 08.30 – 13.00 WIB yang diikuti oleh delapan kota/kabupaten. Sedangkan sesi kedua dilaksanakan pada pukul 14.00 – 18.00 WIB dengan peserta dari sembilan kota/kabupaten. Sesi ketiga dan keempat dilaksanakan pada Jumat, 12 November 2010. Sesi ketiga dilaksanakan pada pukul 08.30 – 12.00 WIB yang diikuti oleh tujuh entitas baru hasil pemekaran yang baru akan menghasilkan LKPD pada tahun 2010 ini. Sedangkan sesi terakhir dilaksanakan pada pukul 14.00 – 18.00 WIB yang diikuti oleh delapan entitas yang mendapatkan opini disclaimer untuk LKPD 2009.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah tentang Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dijelaskan oleh Yusnadewi M.Si., Ak., Kepala Subauditorat Sumut I BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dalam paparannya, Yusnadewi menjelaskan tentang ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, jenis-jenis opini yang

diberikan terhadap Laporan Keuangan serta ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan hal tersebut.

Materi kedua adalah tentang permasalahan-permasalahan yang selama ini ditemukan dalam LKPD sehingga mengakibatkan belum ada satu entitas pun di Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan opini WTP. Ada empat permasalahan utama yaitu permasalahan pengelolaan kas, persediaan, piutang dan aset. Materi ini disampaikan secara bergantian oleh Ailando Siregar, S.E., Ak., Kepala Seksi Sumut II B dan Del Esther, S.E., M.AP., Ak., Kepala Seksi Sumut III B.

Materi terakhir adalah mengenai langkah-langkah menuju opini WTP berdasarkan paket tiga undang-undang tentang keuangan negara yang disampaikan oleh Hari Wihoho, S.E., Ak., M.M., Kepala Seksi Sumut IA. Materi ini berisi tentang enam langkah agar LKPD dapat mencapai opini WTP berdasarkan paket tiga undang-undang tentang keuangan negara. Keenam langkah tersebut meliputi sistem pembukuan dan perencanaan anggaran, sistem aplikasi teknologi komputer, inventarisasi aset dan hutang, jadwal waktu penyusunan LK dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran, quality assurance yang dilakukan oleh pengawas intern dan membenahan sumber daya manusia.

Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan entitas dapat memperbaiki penyusunan LKPD untuk tahun 2010 sehingga nantinya akan ada yang mencapai opini WTP karena selama tiga tahun terakhir ini, tidak ada satu pun entitas di Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan opini WTP. Untuk entitas baru hasil pemekaran, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan bekal yang cukup dalam menyusun LKPD sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kemungkinan dapat mempengaruhi pembentukan opini oleh BPK. (dkr)



POJOK ANAK-MEDAN BAHASA

Bengap artinya babak belur

Cakap artinya ngomong, berbicara

Pajak artinya pasar

Pasar artinya jalan

Semalam artinya kemarin

Sumber : www.kamus-medan.blogspot.com



TENTANG BPK RI

Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK RI Tahun Anggaran 2010 ini, BPK RI membuka 495 formasi dari tingkat S1, D3 dan SMK. Jumlah ini mengalami peningkatan dari penerimaan CPNS BPK RI tahun lalu yang terbuka untuk 443 formasi dari tiga tingkat pendidikan tersebut.

sumber : www.cpn.s.bpk.go.id

- Galeri Foto Bulan Ini -



Mikael P. H. Togatorop, Kasubbag Hukum dan Humas BPK RI Pwk Prov. Sumut menjadi moderator dalam acara Diseminasi UU 15/2004 dan UU 15/2006, Senin, 8 November 2010



Ekspos Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Tinggi Prov. Sumut Jumat, 26 November 2010



Kepala BPK RI Pwk Prov. Sumut didampingi oleh Kasubbag Hukum dan Humas memberikan keterangan kepada wartawan sesuai acara Sosialisasi Menuju Opini WTP

WORKSHOP PEMERIKSAAN KINERJA TINGKAT EKSEKUTIF ANGKATAN II

Kamis - Jumat, 18 - 19 November 2010

Novotel, Medan





MUSEUM NEGERI SUMATERA UTARA

Museum Negeri Sumatera Utara merupakan museum terbesar di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan salah satu museum terbaik di Indonesia. Museum yang berlokasi di Jalan H.M. Jhoni 51 Medan ini dibangun pada tahun 1954 dan dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daed Yoesoef, pada tahun 1982.

Seperti kebanyakan museum lainnya, Museum Negeri Sumatera Utara memiliki bangunan yang luas, informatif dan tertata dengan baik. Museum ini berisi berbagai peninggalan sejarah kebudayaan bangsa serta hasil kesenian dan kerajinan dari berbagai suku di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Koleksi-koleksi dalam museum ini menceritakan tentang perkembangan wilayah Sumatera Utara, mulai dari jaman prasejarah hingga saat ini. Koleksi-koleksi penting Museum Negeri Sumatera Utara diantaranya adalah batu kubur yang bertuliskan huruf Arab dari abad ke-8 masehi dan sebuah patung Budha yang terbuat dari batu yang ditemukan di sekitar Pecinan Kota Medan.

Sejak diresmikan pada tahun 1982, museum ini memiliki 6.799 koleksi benda-benda bersejarah yang terbagi menjadi 10 jenis kelompok yaitu koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, keramologika, seni rupa dan koleksi yang berteknologi.

Museum Sumatera Utara juga menyimpan koleksi patung pengantin lengkap dengan ornamen-ornamen-



Peti Mati Suku Nias



Delapan kelompok etnis yang ada di Provinsi Sumatera Utara

nya dari berbagai suku utama di Sumatera Utara seperti Melayu, Batak Toba, Karo, Simalungun, Angkola, Mandailing, Pak-pak dan Nias. Di dalam museum ini juga terdapat sejumlah benda-benda tradisional, seperti ulos Batak Toba, peti mati yang disebut Ruma-ruma atau Parmual-mualan Solu Bolon beserta simbol bentuk dan ornamennya.

Selain koleksi-koleksi tersebut, Museum Negeri Sumatera Utara juga menyimpan koleksi benda peninggalan sejarah perjuangan Sisingamangaraja XII. Salah satu peninggalan sejarah Sisimangaraja XII adalah selendang merah hasil tenunan Sunting Miriam, istri Sisimangaraja XII, pada saat ditawan oleh penjajah Belanda. Selendang tersebut ditenun oleh Sunting Miriam untuk mengisi waktu senggangnya sekaligus sebagai kenang-kenangan atas penderitaan yang dialaminya selama ditahan oleh Belanda pada tahun 1935. Selain itu, museum ini juga menyimpan duplikat bendera perang Sisingamangaraja XII.

Berdasarkan catatan sejarah yang diletakkan bersebelahan dengan peninggalan Sisingamangaraja XII dapat diketahui bahwa raja ini memiliki prinsip yang berbeda dengan ayahnya. Benda-benda peninggalannya dipajang untuk mengabadikan perjuangan Sisingamangaraja XII di tanah Sumatera dan sebagai tanda kejayaan kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII di tanah Sumatera Utara. (dari berbagai sumber)



Bagian dalam Museum Negeri Sumatera Utara. Berbagai macam koleksi bersejarah dipamerkan di ruangan ini

DIKLAT SOSIALISASI PP NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA



Sebagai lanjutan dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan pada 11 – 12 Oktober 2010, Balai Diklat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan Diklat Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 24 – 25 November 2010 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pesertanya merupakan para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Bertindak sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah Fadli Arif, Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini merupakan pendalaman materi yang telah disampaikan dalam sosialisasi sebelumnya. Pemateri memberikan penjelasan tentang latar belakang mengapa Keputusan Presiden nomor

80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diganti dengan PP nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu alasannya adalah masih adanya multi-tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam Keppres nomor 80 tahun 2003. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan baru yang lebih komprehensif dan jelas sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemateri juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam PP nomor 54 tahun 2010 ini dengan peraturan sebelumnya. Para peserta antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh pembicara dan aktif dalam kegiatan tanya jawab.

Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu dapat digunakan untuk kepentingan internal BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. (dkr)

.....lanjutan hal. 1: INDAHNYA BERKURBAN

Daging-daging kurban tersebut dibagikan kepada para fakir miskin yang ada di sekitar tempat tinggal para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga dibagikan kepada para pegawai golongan II dan petugas cleaning service yang ada di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pada Hari Raya Idul Adha, umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban yang nantinya akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Ibadah kurban ini pada hakikatnya memiliki dua nilai, nilai ritual dan nilai sosial. Nilai ritual berarti dengan berkorban berarti kita telah melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat transedental. Sedangkan nilai sosial juga melekat karena terdapat dimensi kemanusiaan dalam pelaksanaan ibadah kurban.

Pembagian daging kurban merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan yang termanifestasi dengan jelas. Dengan melaksanakan ibadah kurban maka dapat mempertebal rasa kemanusiaan, mengasah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan mengajarkan sikap saling menyayangi antar sesama manusia (dkr).



Kenali entitas

KABUPATEN DELI SERDANG



Desain Bandara Kuala Namu

Lokasi : 2°57' - 3°16' LU dan antara 97°52' - 98°45' BT

Luas wilayah :

2.394,62 km² yang secara administratif terbagi menjadi 22 kecamatan dan 2 perwakilan kecamatan dengan 379 desa dan 15 kelurahan

Batas wilayah : Utara : Selat Sumatera
Timur : Kabupaten Serdang Bedagai
Selatan : Kabupaten Karo
Barat : Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat

Kabupaten Deli Serdang dahulu dikenal sebagai Kabupaten Deli dan Serdang dengan pusat pemerintahan yang berada di Kota Medan. Hal ini karena sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan, yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang yang berpusat di Perbaungan. Daerah ini secara geografis terletak di wilayah pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara dengan keadaan topografi dan kontur yang bervariasi. Hal inilah yang mengakibatkan iklim di daerah ini juga bervariasi yaitu iklim subtropis dan iklim peralihan antara subtropis dan tropis. Pada tahun 2004, wilayah ini mengalami perubahan baik secara geografis maupun administratif pemerintahan setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya kabupaten baru dari wilayah ini yaitu Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2003. Sektor usaha yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah setempat untuk dikembangkan meliputi sektor industri, perikanan, perkebunan dan pertanian. Kabupaten ini merupakan lokasi Bandar Udara Kuala Namu di Kecamatan Pantai Labu dengan luas ± 1.564 Ha sebagai pengganti Bandar Udara Polonia Medan.

Sumber : www.deliserdang.go.id & berbagai sumber

Upgrade
your mind

BAHAYA KANTONG KRESEK HITAM

Tanpa kita sadari, kita sering kali menggunakan kantong kresek hitam untuk membungkus makanan yang kita beli sehari-hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kantong kresek hitam ini mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengkontaminasi makanan yang ada di dalamnya.

Kantong kresek hitam ini banyak dipakai oleh para penjual makanan karena harganya yang relatif lebih murah dan mudah didapatkan di mana saja. Namun sebenarnya kantong kresek hitam ini dapat mem-

bahayakan kesehatan manusia.

Untuk mengatasi hal ini, BPOM telah mengeluarkan Peringatan Publik Kantong Plastik "Kresek" nomor KH.00.02.1.55.2890, tanggal 14 Juli 2009. Dalam peringatan publik tersebut disebutkan bahwa kantong kresek hitam kebanyakan merupakan produk daur ulang yang dalam prosesnya tidak diketahui riwayat penggunaan sebelumnya. Selain itu juga terdapat berbagai bahan kimia yang menambah dampak bahayanya bagi kesehatan. BPOM juga melarang penggunaan kantong plastik warna hitam ini untuk membungkus makanan siap santap. (dari berbagai sumber)

UJIAN TERTULIS PENERIMAAN CPNS BPK RI TAHUN 2010

Pada tahun anggaran 2010 ini, BPK RI membuka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pemeriksa



Keuangan Republik Indonesia (CPNS BPK RI) untuk tingkat S1, D3 dan SMK yang akan ditempatkan di semua unit kerja BPK RI di seluruh Indonesia. Penerimaan CPNS BPK RI ini mulai dibuka pada bulan Oktober 2010. Sejak dibukanya pendaftaran hingga akhir masa penerimaan berkas pelamar, tercatat 41.838 pelamar dari seluruh Indonesia yang memasukkan berkasnya untuk mengikuti seleksi ini. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan lolos administrasi hanya sekitar 32,5% atau 13.583 pelamar.

Untuk lokasi ujian Medan, tercatat sebanyak 2.328 pelamar yang memasukkan berkasnya dan hanya 660 pelamar atau sekitar 28,35% yang dinyatakan lolos seleksi administratif dan berhak mengikuti seleksi tahap I yaitu ujian tertulis. Sebelum melaksanakan ujian tertulis, para pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi administratif diharuskan untuk melakukan pengesahan kartu peserta ujian.

Pengesahan ini dilakukan pada hari Kamis

dan Jumat, 18 – 19 November 2010 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pukul 09.00 – 15.00 WIB. Pengesahan ini dilakukan oleh panitia penerimaan CPNS BPK RI tahun anggaran 2010 dari Biro SDM BPK RI yang bekerja sama dengan Subbagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Seleksi tahap I ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 November 2010 di Universitas Negeri Medan (Unimed), Jalan Wilem Iskandar Pasar V Medan. Ujian tertulis ini meliputi Tes Potensi Akademik (TPA) bagi peserta ujian dari tingkat S1, D3 dan SMK dan Tes Bahasa Inggris untuk peserta dari tingkat S1 dan D3.

Dari 660 peserta ujian tertulis, hanya sekitar 400 peserta yang mengikuti seleksi tahap I ini. Hal ini disebabkan banyak peserta ujian yang datang terlambat ke lokasi ujian sehingga tidak diperbolehkan memasuki ruang ujian oleh panitia. Para peserta dengan antusias mengikuti seleksi ini mengingat semakin ketatnya persaingan untuk dapat lolos menjadi CPNS di lingkungan BPK RI. (dkr)

- Renungan -

Einstein mengatakan bahwa: "Ada dua cara menjalani hidup, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-keajaiban atau menjalaninya dengan biasa-biasa saja"